



Pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP), Konsumsi, Pariwisata, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Sumatera

Rizki Haryati ^{1*}, Maimun ², Khairul Amri ³

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Ar-raniry Aceh

² Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Ar-raniry Aceh

³ Prodi S2 Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Ar-raniry Aceh

*Corresponding author: email: rharyati23@mail.ac.id

Abstract

Keywords:

Farmer Exchange Rate,
Consumption,
Tourism, Poverty
Level, Gross Regional
Domestic Product

This research examines the influence of the Farmer's Exchange Rate (NTP), consumption, tourism, and poverty levels on Gross Regional Domestic Product (GRDP). The aim of this research is to see the influence of the Farmer Exchange Rate (NTP), consumption, tourism and poverty levels on GRDP in ten provinces on the island of Sumatra. This research uses quantitative methods and the research approach is library research. And the direction and objectives of the research are descriptive and T test, F test and coefficient of determination test (R²). This quantitative research relates to ideas, the influence on the Farmer's Exchange Rate (NTP), consumption, tourism and poverty levels and GRDP in ten provinces on the island of Sumatra. Prob Value.. The results show that the FER and tourism consumption have a positive and significant effect on GRDP, while the poverty rate has a negative and significant effect. From an Islamic economic perspective, these findings indicate that increasing farmers' welfare and sustainable tourism development can support fair and inclusive economic growth, while efforts to reduce poverty remain a primary focus in achieving social justice. This research is expected to contribute to the development of economic policies in the Sumatra region, particularly in improving community welfare through an economic approach based on Islamic principles.

Abstrak:

Kata Kunci:

Nilai Tukar Petani,
Konsumsi,
pariwisata, tingkat
kemiskinan, Produk
Domestik Regional
Bruto

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP), konsumsi, pariwisata, dan tingkat kemiskinan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP), konsumsi, pariwisata, dan Tingkat kemiskinan terhadap PDRB pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan penelitian adalah *library research*. Serta arah dan tujuan penelitian ialah deskriptif dan uji T, Uji F dan uji koefisien determinasi (R²). Penelitian kuantitatif ini berhubungan dengan ide, pengaruh terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), konsumsi, pariwisata dan tingkat kemiskinan dan PDRB pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTP dan konsumsi pariwisata memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap PDRB, sementara tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Dari perspektif ekonomi Islam, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, sementara upaya pengurangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam mencapai keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi di wilayah Sumatera, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

How To Cite: Haryati, Rizki., Maimun, & Amri, Khairul. (2024). Pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP), Konsumsi, Pariwisata, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi (JIEI)*, Vol 1 No. 2, 110 – 133. DOI: Xxxxx

Received : 3 Agustus 2024 ; Revised: 7 Agustus 2024 ; Accepted: 17 Agustus 2024



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, memperlancar hubungan ekonomi, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun ke sektor tersier. (Fahlewi, R., Amri, R. R., & Sari, A. M. 2020)

Upaya pembangunan yang terlaksanakan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meratakan hasil-hasil pembangunan. Mengukur tingkat pembangunan suatu masyarakat atau bangsa diperlukan tolak ukur dengan indikator-indikator yang sesuai dengan pengertian yang tersirat dalam konsep dan definisi dari pembangunan yang dilaksanakan. (Suband, 2014)

Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi, diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya juga tinggi. Untuk itu khusus pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk

Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan (BPS, 2023).

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto di Kepulauan Sumatera Tahun 2014-2023

No	Provinsi	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	1,2	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02	1,06	1,09	1,1	1,11
2	Sumatera Utara	4,89	4,91	4,96	4,98	4,95	4,99	5,15	5,07	4,99	5,12
3	Sumatera Barat	1,54	1,54	1,55	1,56	1,54	1,53	1,53	1,49	1,49	1,52
4	Sumatera Selatan	2,87	2,85	2,8	2,79	2,8	2,83	2,88	2,91	3,08	3,06
5	Riau	6,36	5,6	5,4	5,13	5,02	4,74	4,62	4,95	5,18	5
6	Jambi	1,36	1,33	1,36	1,38	1,39	1,35	1,3	1,37	1,45	1,43
7	Bengkulu	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
8	Lampung	2,16	2,17	2,21	2,23	2,22	2,22	2,24	2,19	2,16	2,19
9	Bangka Belitung	0,53	0,52	0,52	0,51	0,49	0,47	0,48	0,51	0,5	0,5
10	Kepulauan Riau	1,69	1,71	1,71	1,66	1,66	1,67	1,61	1,63	1,61	1,62

Sumber: BPS, 2024

Data diatas merupakan data PDRB tahunan selama periode 2014-2023, Berdasarkan persentase pada tabel diatas pada tahun 2020 provinsi Sumatera Utara, menunjukkan angka tertinggi mencapai 5,15. Pada tahun tersebut Bengkulu menjadi provinsi dengan persentase jumlah Produk Domestik regional Bruto terendah sebesar 0,42.

Barang dan jasa yang diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Jika disederhanakan produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing, serta indikator – indikator yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Sektor pertanian yang berkembang di setiap wilayah memiliki berbagai jenis komoditas seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa pertanian. Keenam komoditas tersebut merupakan sumber pertumbuhan produk domestik bruto sector pertanian. Kontribusi sektor pertanian dapat dilihat dari kontribusi produk pertanian berkualitas tinggi terhadap PDRB, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pertanian sebagai sektor utama di wilayah tersebut. Kontribusi ini dilihat dari prakiraan produksi di sektor pertanian selama periode yang telah ditentukan untuk melihat hasil prakiraan yang akan terjadi pada tahun berikutnya, kemudian untuk mengetahui komoditas unggulan sektor pertanian, digunakan ukuran kontribusi bahan baku unggulan terhadap produk domestik bruto daerah (Novima Mustika Sari & Eni Setyowati, 2023).

Salah satu bentuk dari pembangunan perekonomian negara juga berupa nilai tukar petani, yang menjadi unsur dari kesejahteraan petani yaitu berupa kemampuan daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangganya, sehingga diperlukan adanya suatu indikator untuk mengukur dan menggambarkan bagaimana kesejahteraan petani yaitu berupa nilai tukar petani (NTP). Nilai tukar petani menggambarkan bagaimana nilai tukar antara produk pertanian yang dihasilkan petani untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai NTP merupakan bukti bahwa semakin kuat pula daya beli dan kesejahteraan petani (BPS, 2017).

Diantaranya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dan indeks harga yang dibayar petani (I_b). (BPS, 2017) Relatif lemahnya perkembangan sektor pertanian, baik dalam arti diversifikasi produksi maupun laju pertumbuhan outputnya, mengakibatkan pendapatan riil yang diterima petani rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan riil yang diterima pekerja di sektor industri.

Tabel 2
Indeks Nilai Tukar Petani

No	Provinsi	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	98,15	96,64	96,26	94,73	94,73	98,38	98,74	104,51	109,59	111,00
2	Sumatera Utara	100,08	98,61	100,19	99,39	97,98	104,39	109,83	103,86	106,38	105,97
3	Sumatera Barat	100,60	97,73	97,66	96,97	95,31	100,05	100,59	95,46	96,92	99,06
4	Sumatera Selatan	100,89	96,86	94,58	95,03	93,61	98,92	95,37	100,26	104,67	109,91
5	Riau	96,94	95,23	98,70	102,97	97,97	106,39	118,79	102,20	103,12	104,28
6	Jambi	97,02	95,43	98,60	100,78	99,48	101,75	107,62	110,33	110,19	107,07
7	Bengkulu	96,33	93,90	93,06	94,49	94,01	104,83	114,10	100,88	103,86	105,84
8	Lampung	104,18	103,18	103,91	105,16	105,84	96,96	94,73	102,86	103,00	102,70
9	Bangka Belitung	101,56	104,71	101,41	95,78	86,88	102,35	103,95	110,69	111,60	110,67
10	Kepulauan Riau	100,92	99,44	98,15	97,54	96,50	101,11	99,19	108,93	110,62	109,28

Sumber : www.bps.go.id

Selanjutnya yang menjadi indikator yaitu Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi non makanan, begitupun sebaliknya. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan makanan.

Konsumsi yang didefinisikan aktivitas dan tindakan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Termasuk dalam kebutuhan konsumsi ini antara lain adalah pengeluaran untuk pakaian, sandang pangan dan papan. Dalam teori ekonomi konvensional, konsumsi tidak memiliki norma ataupun aturan. Satu-satunya yang menjadi pembatas dalam konsumsi hanyalah kelangkaan sumber daya, baik ini kelangkaan dalam artian luas seperti ketersediaan sumber daya ataupun kelangkaan dalam arti yang lebih sempit yaitu kelangkaan budget yang dimiliki (Dina Kurnia

Salwa 2019).

Tabel 3
Persentase rata -rata konsumsi 10 provinsi di kepulauan Sumatera tahun 2014 -2023

No	Provinsi	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	65,31	60,30	60,18	63,25	60,47	60,85	59,95	61,23	60,94	61,22
2	Sumatera Utara	63,25	60,53	61,09	63,82	60,62	59,12	58,22	60,21	60,96	60,78
3	Sumatera Barat	62,60	58,40	60,12	60,24	57,32	57,22	57,26	56,96	58,64	57,22
4	Sumatera Selatan	59,82	57,87	58,17	59,41	55,97	56,19	56,02	56,80	57,59	57,46
5	Riau	58,66	53,32	56,02	57,75	54,15	54,63	54,62	54,46	54,91	55,04
6	Jambi	58,45	54,17	55,05	60,15	55,21	55,38	56,15	55,16	56,05	53,90
7	Bengkulu	61,03	55,28	55,95	59,37	54,61	54,52	56,15	56,14	56,52	55,63
8	Lampung	58,42	54,92	55,18	58,33	54,43	54,97	54,27	55,89	56,69	56,26
9	Bangka Belitung	55,50	54,11	52,48	58,12	53,97	53,07	55,45	54,52	57,09	54,82
10	Kepulauan Riau	58,18	54,33	51,96	55,97	54,31	55,00	54,49	55,46	56,60	52,59

Sumber :www.bps.go.id

Tabel 3 diatas menunjukkan persentase konsumsi 10 provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2023. Persentase Rata -rata pengeluaran konsumsi tertinggi menurut data diatas adalah tahun 2014 diduduki oleh provinsi Aceh mencapai 65.31 persen Seiring perjalanan waktu industri pariwisata menjadi salah satu indikator dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pariwisata merupakan salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain dalam negara penerima wisatawan.

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Aktivitas pariwisata ini diyakinkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan

penduduk pada suatu daerah. Kemiskinan Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Tabel 4
Persentase Kunjungan Wisata tahun 2014 – 2023 10 Provinsi Kepulauan Sumatera

No	Provinsi	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	2,08	1,76	1,62	1,62	1,53	1,35	1,49	1,5	1,49	1,21
2	Sumatera Utara	1,28	1,41	1,4	1,36	1,36	1,21	1,18	1,41	1,17	1,13
3	Sumatera Barat	1,46	1,35	1,23	1,29	1,41	1,31	1,31	1,67	1,12	1,09
4	Sumatera Selatan	1,65	1,55	1,48	1,52	1,48	1,46	1,56	1,52	1,25	1,22
5	Riau	1,59	1,73	1,46	1,56	1,42	1,29	1,31	1,6	1,27	1,24
6	Jambi	1,92	1,48	1,83	1,89	1,78	1,35	1,33	1,48	1,29	1,09
7	Bengkulu	1,54	1,27	1,17	1,32	1,3	1,34	1,3	1,5	1,39	1,21
8	Lampung	1,55	1,17	1,39	1,43	1,24	1,4	1,27	1,37	1,21	1,23
9	Bangka Belitung	1,8	1,48	1,62	1,58	1,49	1,33	1,42	1,72	1,42	1,58
10	Kepulauan Riau	2,08	1,76	1,62	1,62	1,53	1,35	1,49	1,5	1,49	1,21

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 1.4 menunjukkan kunjungan wisatawan selama priode 2014-2023 pada kepulauan Sumatera.pada tahun 2014 Kepulauan Riau menjadi peringkat pertama persentase kunjungan pariwisata mencapai 2.28. kemudian disusul Aceh Pada tahun 2014 aceh menjadi dalam kunjungan wisatawan mencapai 2.08

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan ekonomi secara makro yang menghambat terciptanya kehidupan yang adil sejahtera serta merata dan menjadi masalah pembangunan ekonomi secara makro yang merupakan suatu tujuan pencapaian yang diharapkan setiap negara. Beragam macam pemikiran di setiap masa, baik secara definitive maupun faktornya hingga aplikatif berupa tindakan dilakukan

agar menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.

Tabel 5
Tingkat Kemiskinan 10 provinsi kepulauan Sumatera

No	Provinsi	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	16,98	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45
2	Sumatera Utara	9,85	10,53	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15
3	Sumatera Barat	6,89	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
4	Sumatera Selatan	13,62	14,25	13,54	13,19	12,8	12,71	12,66	12,84	11,9	11,78
5	Riau	7,99	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68
6	Jambi	8,39	8,86	8,41	8,19	7,92	7,6	7,58	8,09	7,62	7,58
7	Bengkulu	17,09	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04
8	Lampung	14,21	14,35	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11
9	Bangka Belitung	4,97	5,4	5,22	5,2	5,25	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52
10	Kepulauan Riau	6,4	6,24	5,98	6,06	6,2	5,9	5,92	6,12	6,24	5,69

Sumber :www.bps.go.id

Tabel 1.5 menunjukkan tingkat kemiskinan di 10 provinsi kepulauan sumatera tahun 2014 -2023. Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah setiap tahunnya.

LANDASAN TEORI

Produk Domestik Regional Bruto

Pendapatan regional didefinisikan sebagai tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah, dimana tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah tertentu (Tarigan, R. 2004).

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam tiga bulan atau semesteran.

Sedangkan, nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (BPS,2023)

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah pengukur kemampuan tukar barang – barang pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam menghasilkan produk pertanian. Indeks NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang diterima petani (It) dengan Indeks Harga yang di bayar petani (Ib). Sedangkan indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dan indeks yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baikitu kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Menurut penelitian Fortunika, dkk (2017) dengan judul “Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara”. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil dari penelitiannya ialah Berdasarkan analisis input-output, peran sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Banjarnegara dideskripsikan melalui struktur permintaan, struktur rumah tangga pemerintah, ekspor-impor, investasi dan nilai tambah bruto (NTB) baik dalam lingkup sektor ekonomi secara luas ataupun sektor pertanian secara khusus. Pada aspek struktur permintaan, sektor pertanian berada pada peringkat kedua tertinggi setelah sektor industri baik untuk permintaan akhir maupun permintaan total. Kedua sektor ini mendominasi lebih dari 50% permintaan total. Tingginya nilai permintaan akhir ini menunjukkan bahwa output dari sektor pertanian lebih banyak dikonsumsi langsung oleh konsumen daripada digunakan sebagai input oleh produsen. Pada aspek struktur rumah tangga pemerintah, konsumsi rumah tangga sektor pertanian menduduki peringkat ketiga setelah sektor industri dan perdagangan yaitu sebesar Rp810,0 milyar atau 13,81%. Sektor industri mendominasi 47,84% dari total konsumsi rumah tangga. Di

sisi lain, konsumsi pemerintah hanya kepada sektor jasa (Fortunika, 2017).

KONSUMSI

Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya, sehingga tercapai tingkat kemakmuran.

Para Ahli Ekonomi memiliki pendapat masing masing dalam mengartikan teori Konsumsi John Maynard Keynes: Keynes memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi Keynes (absolut income hypothesis). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besar nya konsumsi dan pendapatan disebut Keynes sebagai Marginal Propensity to Consume (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. (Hainnur Aqma Rahim, Keynes, 2018).

KONSUMSI MENURUT EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyyah (Walter Benjamin, 2019).

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah *maslahah*. "*Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia". *Maslahah* memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. *Maslahah* hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh syara (Dina Kurnia Salwa, 2019)

Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap ishrاف (berlebihan) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Seorang konsumen

Muslim harus memperhatikan produk-produk yang dikonsumsi agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta tidak berlebihan. Keimanan seorang Muslim dapat diukur dengan bagaimana seorang Muslim menjalani kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan hadits. (Zulfikar dan Meri. 2014.)

PARIWISATA

Pariwisata dikenal dengan istilah *tourism* berarti kepariwisataan. Menurut Marpaung, pariwisata merupakan gabungan gejala atau hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta penunjang lainnya. (Marpaung, Happy. 2012) Perjalanan wisata yang dilakukan bukan merupakan pergerakan yang bersifat ulang alik sebagaimana definisi yang dinyatakan oleh Gunn pariwisata adalah seluruh perjalanan wisata meliputi daerah yang luas namun bukan termasuk dalam pergerakan ulang alik (Gun, 2015)

Menurut Badan Pusat Statistik pariwisata adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya kesuatu tempat atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa maksud mencari nafkah. (Bps, 2017)

PARIWISAT MENURUT EKONOMI ISLAM

Pariwisata dan keterkaitannya dengan ekonomi syariah, diperlukan definisi operasional tentang pariwisata. Pariwisata adalah satu system yang mengikut sertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi dengan kaidah-kaidah Syariah. Sudut pandang syariat Islam, aktivitas pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip *ta'arruf* (saling mengenal), *ta badul almanafi'* (pertukaran manfaat) dan *ta'awwun* dan *takaful* (saling menolong dan saling menanggung resiko). Oleh karena itu, salah satu misi ilmu kepariwisataan dalam Islam adalah menyusun secara ilmiah dan sistematis upaya-upaya untuk memaksimalkan manfaat pariwisata dan meminimalkan dampak negatifnya.

Pada dasarnya terkait dengan bisnis pariwisata, terdapat berbagai pelaku usaha serta kelompok-kelompok di industri pariwisata yang belum sepenuhnya memahami wisata syariah. Sampai sekarang wisata syariah dianggap seperti ziarah menuju

kuburan atau perjalanan kepada masjid. Kenyataannya, wisata syariah merupakan kegiatan wisata yang diciptakan dari alam, budaya, atau oleh manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Addainuri, 2023).

KEMISKINAN

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini di tandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan. (Elly M. Setiadi, Usman Kolip, 2011)

Pengertian Kemiskinan Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Metode dalam perhitungan kemiskinan badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Secara asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya factor – factor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.
2. Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri

mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”. (BPS,2023)

KEMISKINAN MENURUT EKONOMI ISLAM

Lafadz miskin merupakan ism masdar yang berasal dari sakana-yaskunu-sukun/miskin. Dilihat dari asalnya sakana-sukun, kata ini memiliki makna diam, tetap atau reda. Al-Isfahani dan Ibn Manzur mengartikan kata ini sebagai “tetapnya sesuatu setelah ia bergerak”. Di samping itu juga bias diartikan “tempat tinggal”. Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti “diam”, maka apabila ditarik arti secara istilah yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefaqirannya. Ia tidak dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak atau tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak (QS. al-Kahfi: 79). (Sahabuddin [et al., 2007)

Menurut bahasa, “miskin” berasal dari kata bahasa arab yaitu sakana yang berarti tenang, diam, tidak bergerak. Jadi kondisi miskin diciptakan oleh seseorang yang tidak bergerak atau tidak mampu bergerak sehingga tidak memiliki pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Definisi tentang kemiskinan menurut Nabil Subhi Ath-Thawil adalah tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan ini di anggap pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya. (Aath-Thawil, 1985)

Menurut Qardhawi kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta seseorang, melainkan berkaitan pula dengan berbagai potensi di luar kehartabendaan seperti miskin ilmu, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang, dan lain sebagainya. Islam melihat kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Kemiskinan ini mengancam individu maupun masyarakat akidah maupun iman, serta akhlak maupun moral. Kemiskinan juga membahayakan pemikiran, kebudayaan, keluarga dan umat. (Yusuf Qardhawi. 1995)

METODE PENELITIAN

RANCANGAN PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data numerical atau angka yang diperoleh dengan metode statistic yang tergolong dalam penelitian eksplanasi yang berusaha untuk menjelaskan variable – variable yang diteliti.

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan adalah jenis data *ratio* yang diperoleh dalam bentuk angka yaitu data *time series* dan *Cross section*. Data *Time series* periode tahun 2014– 2023 sedangkan data *Cross Section* adalah 10 provinsi di Pulau Sumatera. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lainnya dan diperoleh dari pihak lain seperti buku – buku literatur, catatan – catatan, data hasil publikasi pemerintah seperti BPS, atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data pada penelitian ini diperoleh dari BPS yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), konsumsi, pariwisata, dan tingkat kemiskinan

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Bila dilihat dari sumbernya, pengumpulan data menggunakan data sumber data skunder yaitu data diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi yaitu data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

OPERASI VARIABEL

Dalam penelitian ini variable – variable yang diamati ada lima variable yaitu variable independent diantaranya NTP (X1), Konsumsi (X2), Pariwisata (X3), dan Tingkat Kemiskinan (X4), sedangkan Variabel dependen PDRB (Y)

METODE ANALISIS DATA

Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh PDRB terhadap NTP, Konsumsi, Pariwisata, dan Tingkat Kemiskinan adalah regresi panel. Mengingat PDRB

dalam penelitian ini diproksi atau didekati dari empat ukuran yaitu sebagai berikut:

$$PDRB_{it} : a + b NTP_{it} \dots (1)$$

$$PDRB_{it} : a + b K_{it} \dots (2)$$

$$PDRB_{it} : a + b P_{it} \dots (3)$$

$$PDRB_{it} : a + b TK_{it} \dots (4)$$

Keterangan:

PDRB_{it} : tingkat Produk Domestik regional Bruto di Provinsi i pada tahun t

NTP_{it} : tingkat Nilai Tukar Petani di Provinsi i pada tahun t

P_{it} : tingkat Pariwisata di Provinsi i pada tahun t

TK_{it} : tingkat kemiskinan di Provinsi i pada tahun t

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Widarjono, ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Hipotesis

1. Uji Chow

Uji chow dipakai dengan tujuan agar memahami model manakah yang terbaik dari *common effect* dan *fixed effect*.

Hipotesis uji chow:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Tolak ukur:

Apabila angka Sig > 0,05 H_0 diterima

Apabila angka Sig < 0,05 H_0 ditolak

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.617630	(9,86)	0.7790
Cross-section Chi-square	6.263263	9	0.7133

Berdasarkan keluaran Eviews di atas diperoleh besaran nilai Sig. uji chow sebesar 0,7133. Hal ini bermakna bahwa Sig. (0,7133) > 0,05 maka H₀ diterima dan dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* yang terbaik.

2. Uji Hausman

Uji Housman bertujuan untuk memahami model yang lebih tepat apakah random effect model atau fixed effect model.

Hipotesis uji hausman:

H₀: *Random Effect Model*

H₁: *Fixed Effect Model*

Tolak ukur:

Apabila angka Sig > 0,05 H₀ diterima

Apabila angka Sig < 0,05 H₀ ditolak

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.507233	4	0.8254

Berdasarkan keluaran Eviews di atas diperoleh besaran nilai Sig. uji hausman sebesar 0,8254. Hal ini bermakna bahwa Sig. (0,8254) > 0,05 maka H₀ diterima dan dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* yang terbaik.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier bertujuan untuk memahami model yang lebih tepat apakah common effect model atau random effect model.

Hipotesis uji hausman:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Tolak ukur:

Apabila angka Sig > 0,05 H_0 diterima

Apabila angka Sig < 0,05 H_0 ditolak

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan)
and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross- section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.949712 (0.3298)	3.432860 (0.0639)	4.382572 (0.0363)
Honda	-0.974532 (0.8351)	1.852798 (0.0320)	0.621028 (0.2673)
King-Wu	-0.974532 (0.8351)	1.852798 (0.0320)	0.621028 (0.2673)
Standardized Honda	-0.795485 (0.7868)	2.194678 (0.0141)	-2.659196 (0.9961)
Standardized King-Wu	-0.795485 (0.7868)	2.194678 (0.0141)	-2.659196 (0.9961)
Gourieroux, et al.	--	--	3.432860 (0.0769)

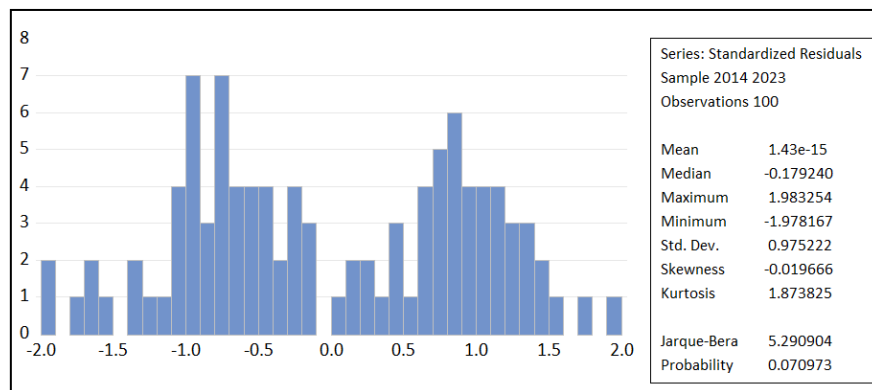
Berdasarkan keluaran Eviews di atas diperoleh besaran nilai Sig. uji lagrange multiplier sebesar 0,0363. Hal ini bermakna bahwa Sig. (0,0363) < 0,05 maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* yang terbaik.

Berdasarkan rangkaian pengujian model terbaik di atas, diperoleh bahwa *Common Effect Model* merupakan model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini.

4.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Asumsi Normalitas

Data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai Probability > 0,05.



Berdasarkan keluaran Eviews di atas diperoleh besaran nilai Probability sebesar 0,070 > 0,05. Oleh karena demikian dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Asumsi Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi korelasi tersebut yaitu dengan adanya *multicollinearity*. Metode yang digunakan untuk mendeteksi hal tersebut melalui nilai VIF. Jika nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.

Variance Inflation Factors

Date: 07/24/24 Time: 14:43

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable	Coefficient Uncentered		
	t	d	Centered
	Variance	VIF	VIF
X1	0.000304	320.7346	1.006339
X2	0.001179	391.0892	1.168812
X3	0.012206	4.120353	1.137388
X4	0.000956	10.63486	1.178353
C	6.803172	686.4252	NA

Berdasarkan keluaran Eviews di atas uji asumsi multikolinearitas dijabarkan sebagai berikut.

- X1 diperoleh nilai VIF (1,006) < 10 bermakna bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.
- X2 diperoleh nilai VIF (1,168) < 10 bermakna bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.
- X3 diperoleh nilai VIF (1,137) < 10 bermakna bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.
- X3 diperoleh nilai VIF (1,178) < 10 bermakna bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dan asumsi multikolinearitas terpenuhi.

3. Asumsi Heteroskedastisitas

Metode glejser, dimana memodelkan variabel bebas terhadap nilai Absolut residual. Dinyatakan memenuhi asumsi heteros (terbebas gejala heteros) jika nilai Prob. > 0,05

Dependent Variable: ABSRES

Method: Panel Least Squares

Date: 07/24/24 Time: 14:14

Sample: 2014 2023

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient			
	nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.540112	1.217779	0.443522	0.6584

X1	0.009137	0.008138	1.122830	0.2643
X2	-0.008698	0.016034	-0.542489	0.5888
X3	-0.012712	0.051583	-0.246431	0.8059
X4	-0.000328	0.014436	-0.022730	0.9819

Berdasarkan keluaran Eviews di atas analisa heteroskedastisitas sebagai berikut.

- X1 diperoleh nilai prob. (0,2643) > 0,05 memenuhi asumsi heteros (terbebas gejala heteros).
- X2 diperoleh nilai prob. (0,5888) > 0,05 memenuhi asumsi heteros (terbebas gejala heteros).
- X3 diperoleh nilai prob. (0,8059) > 0,05 memenuhi asumsi heteros (terbebas gejala heteros).
- X4 diperoleh nilai prob. (0,9819) > 0,05 memenuhi asumsi heteros (terbebas gejala heteros).

Berdasarkan keluaran Eviews di atas diperoleh besaran nilai koefisien determinasi (R Squared) sebesar 0,6347. Hal ini bermakna bahwa variabel NTP (X1), Konsumsi (X2), Pariwisata (X3) dan Kemiskinan (X4) mampu menjelaskan sebesar 63,47% variasi variabel PDRB (Y), sedangkan sisanya 36,53% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan

Uji Simultan atau dikenal sebagai uji f merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel independent memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hipotesis Uji Simultan

H01 : $\beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta_4 \neq 0$; Maka menandakan bahwa NTP (X1), Konsumsi (X2), Pariwisata (X3) dan Kemiskinan (X4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap PDRB (Y).

Ha1 : $\beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta_4 = 0$; Maka menandakan bahwa NTP (X1), Konsumsi (X2), Pariwisata (X3) dan Kemiskinan (X4) secara simultan berpengaruh terhadap PDRB (Y).

Keputusan Hasil Pengujian

Berdasarkan keluaran Eviews di atas, diperoleh besaran Prob (F Statistic) sebesar $0,000 < 0,05$ berkesimpulan menolak H0 (menerima H1). Jadi dapat disimpulkan

bahwa NTP (X1), Konsumsi (X2), Pariwisata (X3) dan Kemiskinan (X4) secara simultan berpengaruh terhadap PDRB (Y).

Uji Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. Jika nilai Prob < 0,05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan keluaran Eviews di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai Prob. NTP (X1) yaitu 0,4298 > 0,05, maka variabel NTP (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB (Y).
- b. Nilai Prob. Konsumsi (X2) yaitu 0,0000 < 0,05, maka variabel Konsumsi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB (Y).
- c. Nilai Prob. Pariwisata (X3) yaitu 0,8992 > 0,05, maka variabel Pariwisata (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB (Y).
- d. Nilai Prob. Kemiskinan (X4) yaitu 0,0000 < 0,05, maka variabel Kemiskinan (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB (Y).

KESIMPULAN

1. Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan PDRB

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara NTP dan PDRB di 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2014-2023. Peningkatan NTP, yang mencerminkan kesejahteraan petani yang lebih baik, berkontribusi terhadap peningkatan PDRB. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani, seperti stabilisasi harga dan subsidi, dapat berdampak positif pada perekonomian daerah.

2. Hubungan Konsumsi dengan PDRB

Analisis menunjukkan bahwa konsumsi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan PDRB. Peningkatan konsumsi masyarakat, yang mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi, berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDRB. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat dan kebijakan yang mendukung daya beli sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hubungan Pariwisata dengan PDRB

Penelitian menemukan bahwa pariwisata memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PDRB. Pariwisata menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB melalui pengeluaran wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata, termasuk pariwisata halal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

4. Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan PDRB

Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat kemiskinan dan PDRB. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya daya beli dan investasi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Saran

1. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani, seperti subsidi input pertanian, stabilisasi harga komoditas, dan peningkatan akses pasar. Program-program tersebut dapat meningkatkan NTP dan, pada akhirnya, PDRB daerah.

2. Stimulasi Konsumsi Masyarakat

Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi sangat penting untuk meningkatkan konsumsi. Peningkatan pendapatan melalui program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan upah minimum dapat mendorong daya beli masyarakat dan, pada akhirnya, PDRB.

3. Pengembangan Sektor Pariwisata

Pemerintah daerah harus fokus pada pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan infrastruktur pariwisata, memperbaiki aksesibilitas, dan mempromosikan destinasi wisata. Pengembangan pariwisata halal juga dapat menjadi daya tarik tambahan, terutama bagi wisatawan muslim.

4. Pengurangan Tingkat Kemiskinan

Program-program pengentasan kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan pelatihan, serta bantuan sosial, perlu ditingkatkan.

Program zakat, sedekah, dan wakaf juga dapat menjadi alat penting dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Penguatan Kerangka Kebijakan

Pemerintah daerah perlu membangun kerangka kebijakan yang komprehensif dan inklusif yang mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, konsumsi, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan. Kerangka kebijakan ini harus didukung oleh data yang akurat dan penelitian yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, cet 1 Terjemahan Muhammad Bagi, (Bandung : Mizan, 1985), h.36
- Addainuri, M. I. (2023). *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal dalam Peningkatan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Pamekasan Madura dengan Pendekatan Analytical Network Processs (ANP)* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62367/>
- Badan Pusat Statistik. *Aceh Dalam Angka*. Aceh, 2017
- BPS, *Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan*, BPS, 2023
- Dina Kurnia Salwa, (2019), *Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya*, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 03, Nomor 02 (2019)
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2011), h. 788
- Gunn. 2015. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Mengunjungi Objek Wisata Kawah Ijo*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.1 No.1
- Hainnur Aqma Rahim, *Keynes' Consumption Theory: A Reevaluation According to the Islamic Perspective*, (GJAT JUNE 2018 VOL 8 ISSUE 17)
- Marpaung, Happy. *Pengetahuan Kepariwisata*. Alfabeta. Bandung, 2012

Sahabuddin [et al.], *Ensiklopedi al-Qur'an; Kajian Kosakata*. Jilid I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Walter Benjamin, "KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM" 3 (2019): 1–9.

Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* terj. Syafril Halim. Jakarta : Gema Insani Press, 1995

Zulfikar dan Meri. 2014. *Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam pada Perilaku Konsumen Muslim*. Jurnal JESTT Vol. 1 No.10 Oktober 2014